



LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat kami selesaikan walaupun dalam bentuk dan isi yang masih jauh dari harapan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Daerah dari yang lainnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, pendapat yang sifatnya produktif untuk perbaikan selanjutnya yang lebih baik.

Atas partisipasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala-kepala Sub Bidang serta seluruh staf Lingkup Badan Pendapatan Daerah dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami mengucapkan terima kasih.

Bengkalis, Januari 2022

Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,



SYAHRUDDIN, SH. MM
PEMBINA

NIP. 19730105 199703 1 005

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2020, adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pada setiap tahunnya.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Eselonering, Tugas Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

KEPALA

1. Kepala mempunyai tugas Membantu Bupati, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah
2. Kepala dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
 - c. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pendapatan Daerah
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendapatan Daerah
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pendapatan Daerah
 - f. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
 - g. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian rumah tangga Badan Pendapatan Daerah
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat
 - e. Pelaksanaan urusan Hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program.
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan kegiatan dan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Sub Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang Pendataan dan Pendaftaran.

2. Susunan Organisasi Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendaftaran.

Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pendaftaran.

b. Sub Bidang Penilaian.

Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Penilaian.

c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Pengolahan Data dan Informasi.

BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN

1. Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penerimaan dan pembukuan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil.

Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang dana bagi hasil.

b. Sub Bidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB.

Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang PBB-P2 dan BPHTB.

c. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah.

BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

1. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penagihan dan keberatan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penagihan.

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang penagihan.

b. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan.

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang keberatan dan pengurangan

c. Sub Bidang Pemeriksaan.

Sub Bagian Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pemeriksaan.

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang pengendalian dan pengembangan.

2. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Analisa dan Pendapatan.

Sub Bidang Analisa dan Pendapatan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang analisa dan pendapatan.

b. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan.

Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pengembangan dan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Bidang Evaluasi Pemantauan

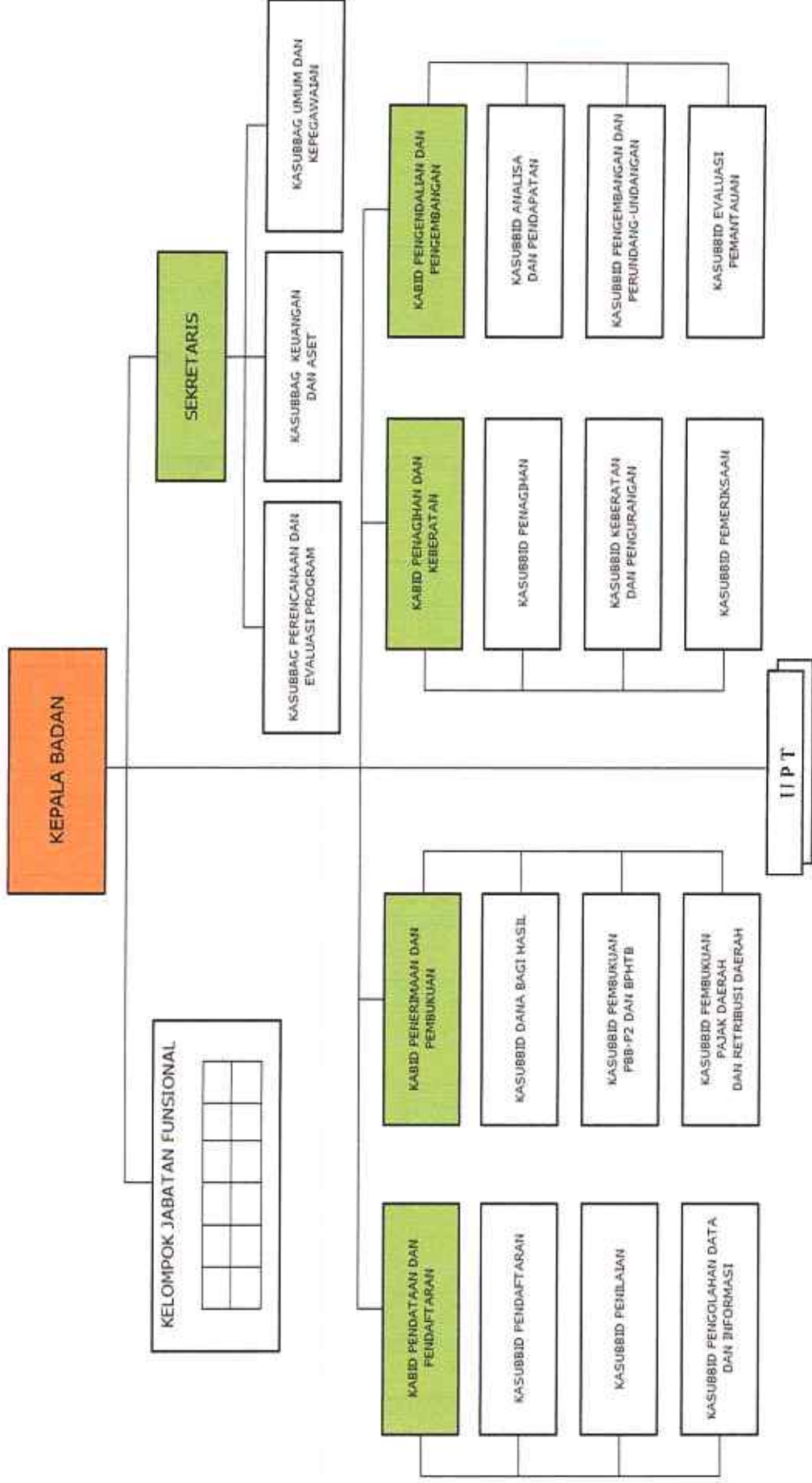
Sub Bidang Evaluasi Pemantauan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang evaluasi dan pemantauan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu atau sebagai perpanjangan Badan di Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. UPT PBB-P2 Sektor Perkotaan dan Perdesaan
 - b. UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis
 - c. UPT Pendapatan Kecamatan Bantan
 - d. UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu
 - e. UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil
 - f. UPT Pendapatan Kecamatan Mandau yang mengkoordinir Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan
 - g. UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir yang mengkoordinir Kecamatan Pinggir dan Tualang Muandau
 - h. UPT Pendapatan Kecamatan Rupal
 - i. UPT Pendapatan Kecamatan Rupal Utara

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan melaporkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

A. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 -2021

Tabel 2.1.
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85%	90%	95%	95%
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan	Meningkatnya Penerimaan Daerah	• Persentase Peningkatan Pajak Daerah	20%	40%	60%	80%	100%
		• Rasio PAD Terhadap APBD	7%	7%	8%	9%	10%
Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	• Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B
		• Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Tepat Waktu	90%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	95%
2	Meningkatkan Penerimaan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%
		Rasio PAD Terhadap APBD	10%
3	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang buat pada awal tahun anggaran 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

**Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Persentase Pelayanan Tepat Waktu	90%	90%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	96%	100%
Meningkatnya Penerimaan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	10%		104%
		79.095.000.000,00	82.344.471.212,00	
	Ratio PAD Terhadap APBD	10%	5,34%	57,66%
		394.122.881.158,83	227.255.505.029,21	
Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan dapat dinilai dari segi Indeks Kepuasan Masyarakat yang bersumber dari pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bengkalis. Salah satu tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dalam administrasi dan pembayaran Pajak Daerah ikut berkontribusi untuk terus meningkatkan pelayanan yang dapat dilihat capainnya sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah

Indikator	2016	2021		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	95%	96,11%	96,11%

Di dalam penilaian indeks kepuasan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melakukan dengan cara menyiapkan koin sebagai indikator untuk menentukan nilai kepuasan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Koin tersebut akan dimasukkan kedalam salah satu dari dua kotak yang telah disiapkan dengan masing-masing penilaian memuaskan dan kurang memuaskan. Dari koin-koin yang terkumpul dalam masing-masing kotak tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah

No	Nilai	WP Yang Memberikan Penilaian	Persentase
1	Memuaskan	1.286	96,11%
2	Kurang Memuaskan	52	3,89%
Jumlah		1.338	100%

Grafik 3.1.
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah



Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan, jumlah sampel yang dikumpulkan dalam satu tahun terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berjumlah 1.338 responden.

Sebanyak 1.286 responden atau 96,11% memberikan penilaian memuaskan dan 52 responden atau 3,81% memberikan penilaian kurang memuaskan.

2. Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah

Untuk melihat persentase Peningkatan Pajak Daerah, maka indikator ini mengambil data dari realisasi yang diterima pada tahun 2021, maka dengan itu indikator ini dapat di lihat keberhasilannya pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Indikator Capaian Kinerja Peningkatan Pajak Daerah

Indikator	2016	2021		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Pajak Daerah	47.851.675.431,61	100%	86% 82.344.471.212,00	86%
		95.703.350.863,22		

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pada Tahun 2021 peningkatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar 100% atau Rp. 95.703.350.863,22 dari awal penetapan pada tahun 2016 yakni Rp. 47.851.675.431,61. Artinya pada tahun 2021 peningkatan target Pajak daerah mengalami kenaikan 47.851.675.431,61 Dari target Pajak Daerah yang ditetapkan untuk tahun 2021, maka realisasinya sebesar 86% atau 83.344.471.212,00. Adapun untuk melihat jumlah peningkatan dan target pajak daerah dapat di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Target rencana strategis dan realisasi Pajak Daerah

NO	TAHUN	TARGET PADA RENSTRA			REALISASI KINERJA TAHUNAN	
		KENAIKAN (%)	NOMINAL KENAIKAN	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	TAHUN 2016	-	-		47.851.675.431,61	
2	TAHUN 2017	20%	9.570.335.086,00	57.422.010.517,93	72.762.987.897,74	127%
3	TAHUN 2018	40%	19.140.670.173,00	66.992.345.604,25	66.854.523.376,25	99,79%
4	TAHUN 2019	60%	28.711.005.259,00	76.562.680.690,58	67.046.859.434,39	88%
5	TAHUN 2020	80%	38.281.340.345,00	86.133.015.776,90	63.710.380.457,25	74%
6	TAHUN 2021	100%	47.851.675.431,61	95.703.350.863,22	82.344.471.212,00	86%

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk Tahun 2021, Realisasi yang dicapai jika mengacu pada Target yang tertera pada Renstra belum mencapai target maksimal, pencapaian Pajak Daerah jika dipersentasekan sebesar 86% persen.

Grafik 3.2.
Target dan realisasi Pajak Daerah



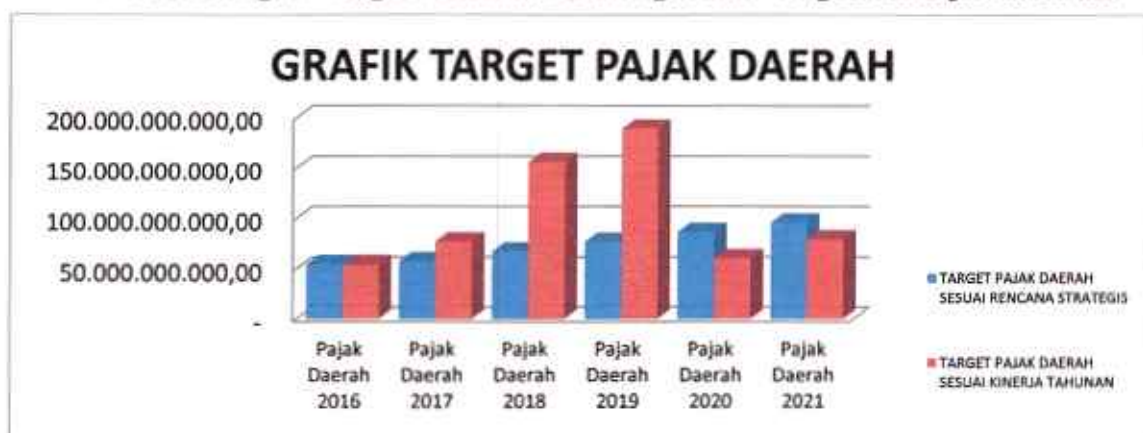
Selain hal tersebut di atas, jika dibandingkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan target Pajak Daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Target dalam Rencana Strategis Dan Target Pajak setiap tahun

No	Penerimaan Pajak Daerah	Rencana Strategis			Target Pajak Daerah		
		Presentase Kenaikan Target dari 2016	Nominal Kenaikan	Target	Presentase Kenaikan/ Penurunan Target dari 2016	Nominal Kenaikan	Target
1	Pajak Daerah 2016			47.851.675.431,61			54.580.000.000,00
2	Pajak Daerah 2017	20%	9.570.335.086,00	57.422.010.517,93	41,08 %	22.420.000.000,00	77.000.000.000,00
3	Pajak Daerah 2018	40%	19.140.670.173,00	66.992.345.604,25	102,59 %	78.995.000.000,00	155.995.000.000,00
4	Pajak Daerah 2019	60%	28.711.005.259,00	76.562.680.690,58	21,03 %	32.805.000.000,00	188.800.000.000,00
5	Pajak Daerah 2020	80%	38.281.340.345,00	86.133.015.776,90	-67,96 %	-128.300.000.000,00	60.500.000.000,00
6	Pajak Daerah 2021	100%	47.851.675.432,00	95.703.350.863,22	44,92 %	24.515.000.000,00	79.095.000.000,00

Dari tabel di atas dapat diartikan bahwa penetapan Target Pajak Daerah antara yang ditetapkan pada Renstra dan target Pajak Daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya sedikit berbeda, hal ini dikarenakan perhitungan Potensi Pajak Daerah dan banyak faktor yang menjadi pertimbangan pada setiap tahunnya, misalnya faktor pertumbuhan Ekonomi, Faktor Alam dan Kesehatan lainnya. Terlihat pada tabel pada Tahun 2020 target Pajak Daerah sebesar Rp.60.500.000,00, terjadi kenaikan sebesar Rp. 18.595.000.000,00 dari target tahun 2021 sebesar Rp. 79.095.000.000,00 Hal ini dikarenakan perhitungan Potensi disaat pandemi wabah Covid 19.

Grafik 3.2.
Perbandingan Target Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan



Sebagai perbandingan target antara yang ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Target yang ditetapkan pada setiap Tahunnya dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Target Pada Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan

NO.	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TARGET DI RENCANA STRATEGIS	TARGET KINERJA TAHUNAN	REALISASI (Rp)
1	Pajak Daerah 2017	57.422.010.517,93	77.000.000.000,00	72.762.987.897,74
2	Pajak Daerah 2018	66.992.345.604,25	155.995.000.000,00	66.854.523.376,25
3	Pajak Daerah 2019	76.562.680.690,58	188.800.000.000,00	67.046.859.434,39
4	Pajak Daerah 2020	86.133.015.776,90	60.500.000.000,00	63.710.380.457,25
5	Pajak Daerah 2021	95.703.350.863,22	79.095.000.000,00	82.344.471.212,00

Grafik 3.3.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Target pada Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan



Realisasi Pajak Daerah ditahun 2021 jika dibandingkan dengan target Renstra yang telah ditetapkan realisasinya mencapai 86%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Pajak Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2021, Realisasi mencapai 104%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan
Target Rencana Strategis dan Realisasi dihitung dalam persentase

No	Tahun	Target Pada Rencana Strategis			Target dan Realisasi Tahunan Pajak Daerah		
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1	2017	57.422.010.517,93	72.762.987.897,74	127 %	77.000.000.000,00	72.762.987.897,74	94 %
2	2018	66.992.345.604,25	66.854.523.376,25	99 %	155.995.000.000,00	66.854.523.376,25	43 %
3	2019	76.562.680.690,58	67.046.859.434,39	88 %	188.800.000.000,00	67.046.859.434,39	36 %
4	2020	66.133.015.776,90	63.710.380.457,25	74 %	60.500.000.000,00	63.710.380.457,25	105 %
5	2021	95.703.350.863,22	82.344.471.212,00	80 %	79.095.000.000,00	82.344.471.212,00	104,11%

Grafik 3.4.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan
Persentase Target Rencana Strategis dan Persentase Target Kinerja



3. Indikator Rasio PAD terhadap APBD

Komponen dari Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mengukur seberapa besar Penerimaan yang berasal dari PAD berkontribusi terhadap APBD Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya, sebagai perhitungan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9.
Indikator Capaian Kinerja
Rasio PAD Terhadap APBD

Indikator	2016	2021		
	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian
Rasio PAD terhadap APBD	151.153.940.623,69	10 %	5,34%	57,66%
		394.122.881.158,83	277.255.505.029,21	

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pada Tahun 2021 peningkatan Rasio PAD terhadap APBD ditargetkan sebesar 10 % atau Rp. 394.122.881.158,83 dari awal penetapan pada tahun 2016 yakni Rp. 281.004.167.284,53. Artinya pada tahun 2021 peningkatan target Pajak daerah mengalami kenaikan 27.588.601.681,12. Adapun untuk melihat jumlah peningkatan dan target Pendapatan Asli Daerah dapat di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

No	Rasio PAD terhadap APBD	Rencana Strategis			Target Tahunan		
		Presentase Kenaikan Target dari 2016	Nominal Kenaikan	Target	Kenaikan/ penurunan Target dari 2016	Nominal Kenaikan/penurunan	Target
1	2016			281.004.167.284,53			281.004.167.284,53
2	2017	7%	21.047.212.129,61	300.674.458.994,45	32,93 %	92.536.224.715,47	373.540.392.000,00
3	2018	7%	22.520.516.978,68	321.721.671.124,06	19,00 %	70.970.058.102,00	444.510.450.102,00
4	2019	8%	24.096.953.167,19	344.242.188.102,74	-3,41 %	-15.139.776.975,00	429.370.673.127,00
5	2020	9%	25.783.739.888,90	368.339.141.269,94	-28,54 %	-122.528.282.978,70	306.842.390.148,23
6	2021	10%	27.588.601.681,12	394.122.881.158,83	12,25 %	37.601.935.216,77	344.444.325.365,00

Grafik 3.5.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan



Berdasarkan gambaran grafik di atas dapat dilihat bahwa rata-rata setiap tahunnya target PAD lebih tinggi dibandingkan target PAD yang ditetapkan pada Renstra Bapenda kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Tabel 3.11.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

NO.	Tahun	TARGET RENCANA STRATEGIS	TARGET PADA APBD	REALISASI (Rp)	%
1	2017	300.674.458.994,45	373.540.392.000,00	117.834.343.573,53	31,55
2	2018	321.721.671.124,06	444.510.450.102,00	331.096.384.302,38	74,49
3	2019	344.242.188.102,74	429.370.673.127,00	226.062.237.942,22	52,65
4	2020	368.339.141.269,94	306.842.390.148,23	266.160.192.237,96	86,74
5	2021	394.122.881.158,83	344.444.325.365,00	227.255.505.029,21	65,98

Grafik 3.6.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan



Dari grafik diatas dapat dilihat target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya, namun belum dapat mencapai target secara maksimal.

Tabel 3.12.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan Dihitung Dalam Persentase

No	Tahun	Rencana Strategis			Target dan Realisasi Tahunan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2017	300.674.458.994,45	117.834.343.573,53	39,19%	373.540.392.000,00	117.834.343.573,53	31,55%
2	2018	321.721.671.124,06	331.096.384.302,38	102,91%	444.510.450.102,00	331.096.384.302,38	74,49%
3	2019	344.242.188.102,74	226.062.237.942,22	65,67%	429.370.673.127,00	226.062.237.942,22	52,65%
4	2020	368.339.141.269,94	266.160.192.237,96	72,26%	306.842.390.148,23	266.160.192.237,96	86,74%
5	2021	394.122.881.158,83	227.255.505.029,21	57,66%	344.444.325.365,00	227.255.505.029,21	65,98%

Grafik 3.7.
Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan



Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwasanya untuk realisasi penerimaan Daerah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- ✓ Intensifikasi Perubahan Tarif pajak melalui Revisi Peraturan-peraturan yang berlaku.
- ✓ Ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan mendata jumlah wajib pajak baru yang melalui sosialisasi/penyuluhan.
- ✓ Kondisi sosial masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi.
- ✓ Sistem Pembayaran yang dilakukan dengan kerjasama perbankan sehingga Masyarakat memudahkan untuk melakukan pembayaran.
- ✓ Koordinasi dan Komitmen Stackholder antar instansi yang cukup baik.
- ✓ Sosialisasi dan penyuluhan baik terhadap Wajib Pajak, maupun kepada aparat yang mengelola bidang PAD.
- ✓ Melakukan respon dengan cepat terhadap pelayanan dan permasalahan yang di hadapi.

D. Permasalahan/Hambatan

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan ataupun hambatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis masih memerlukan adanya perbaikan pada berbagai bidang untuk dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Adanya beberapa kendala/hambatan yang perlu diantisipasi sejak dini, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Kurang kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi potensi yang ada.
- ✓ Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak masih rendah.
- ✓ Sumber daya manusia yang sangat terbatas dan memiliki pendidikan yang kurang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Memberikan Prioritas Pengawasan terhadap kegiatan, program dan kebijaksanaan yang mempunyai bobot atau pengaruh besar terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan kegiatan, program dan kebijaksanaan lainnya serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang

ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus

sepuluh rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan.

Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 41.888.798.510,00 realisasinya pada tahun anggaran tahun 2021 sejumlah Rp 34.687.865.461,00 atau mencapai 82,81%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Realisasi Anggaran terhadap Indikator Kinerja

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	
					Rp.	%
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah						
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya pemukhtahiran dan data	1 Tahun	994.709.000,00	761,177,168,00	76.52 %
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terwujudnya Sistem Integrasi Pelayanan Pajak Daerah	1 Tahun	351.070.000,00	275.304.900,00	78.42 %
Sasaran : Peningkatan Pendapatan Daerah						
3	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Tahun	466.400.300,00	401.160.500,00	86.01 %
4	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Menggali dan mengembangkan Potensi PAD	1 Tahun	413.561.500,00	298.534.500,00	72.19 %
5	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Perda dan Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Tahun	693.965.000,00	479.433.000,00	69,09%
6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Pajak Daerah	Terlaksananya Program Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Tahun	1.170.122.000,00	629.275.900,00	53,78%
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Tertibnya Administrasi dan Penilaian yang akurat terhadap Pajak PBB-P2 dan BPHTB	16 kali	389.232.000,00	252.970.000,00	64,99%

8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tertib Administrasi Dalam Menetapkan Wajib Pajak Baru	50 Wajib Pajak	48.840.000,00	27.935.000,00	57,20 %
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 tahun	397.133.000,00	370.550.000,00	93,31%
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Verifikasi Data Pelaporan Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tertib	1 tahun	413.262.000,00	348.871.000,00	84,42%
11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Terutang	1 tahun	1.226.620.000	917.130.000,00	74,77%
12	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Perpajakan Daerah	1 tahun	156.890.000,00	90.890.000,00	57,93%
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Data Transaksi Wajib Pajak	1 tahun	1.031.190.000,00	807.247.500,00	78,28%
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerimaan Daerah	1 tahun	815.991.200,00	663.731.400,00	81,34%

G. Analisis Efisiensi

Tabel 3.14.
Analisis Efisiensi Terhadap Anggaran dan Indikator Kinerja

NO	URAIAN	IDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		TINGKAT EFISIENSI
				Rp.	%	
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah						
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya pemukhtahiran dan data	994.709.000,00	761.177.168,00	76,52 %	233.531.832,00
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terwujudnya Sistem Integrasi Pelayanan Pajak Daerah	351.070.000,00	275.304.900,00	78,42 %	75.765.100,00
Sasaran : Peningkatan Penerimaan Daerah						

3	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	466.400.300,00	401.160.500,00	86.01 %	65.239.800,00
4	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Menggali dan mengembangkan Potensi PAD	413.561.500,00	298.534.500,00	72.19 %	115.027.000,00
5	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Perda dan Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	693.965.000,00	479.433.000,00	69.09%	214.532.000,00
6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Pajak Daerah	Terlaksananya Program Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.170.122.000,00	629.275.900,00	53,78%	540.846.100,00
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Tertibnya Administrasi dan Penilaian yang akurat terhadap Pajak PBB-P2 dan BPHTB	389.232.000,00	252.970.000,00	64,99%	136.262.000,00
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tertib Administrasi Dalam Menetapkan Wajib Pajak Baru	48.840.000,00	27.935.000,00	57.20 %	20.905.000,00
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	397.133.000,00	370.550.000,00	93,31%	26.583.000,00
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Verifikasi Data Pelaporan Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tertib	413.262.000,00	348.871.000,00	84,42%	64.391.000,00
11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Terutang	1.226.620.000	917.130.000,00	74,77%	309.490.000,00
12	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Perpajakan Daerah	156.890.000,00	90.890.000,00	57,93%	66.000.000,00
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Data Transaksi Wajib Pajak	1.031.190.000,00	807.247.500,00	78.28%	223.942.500,00
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerimaan Daerah	815.991.200,00	663.731.400,00	81.34%	152.259.800,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang disusun ini merupakan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis atas pencapaian penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2021. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan Evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat tergambarkan hasil capaian yang telah ditargetkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja suatu instansi pemerintah dan juga sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Disamping untuk mengetahui gambaran kinerja, juga dapat menjadi bahan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2021 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya.

A. Kesimpulan

Dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis diperoleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum sudah mencapai hasil yang ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Permasalahan yang dihadapi selama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus dicarikan solusi yang tepat guna menjawab permasalahan yang ada.
3. Anggaran / Dana sebagai pendukung yang tersedia dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan harus merealisasikan kebijakan yang dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

B. Saran - saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan langkah-langkah korektif dan antisipatif untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

Bengkalis, Januari 2022

Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,



Signature of Syahrudin, Sh. MM

SYAHRUDDIN, SH. MM
PEMBINA

NIP. 19730105 199703 1 005

